

Analisis Rekrutmen Politik Kader Perempuan Pada Partai Amanat Nasional Di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2018

Endang Biandari Rahayu*¹

¹Universitas Abdurrah

e-mail: *¹endang.biandari.r@student.univrab.ac.id

Diterima: 10 Juli 2023.

Direview: 10 Juli 2023.

Diterbitkan: 10 Juli 2023.

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Abstract – The increasingly strategic role of the younger generation and the emak-emak in the world of politics, causing the National Mandate Party to arrange a recruitment strategy for women in Pekanbaru City. This study aims to identify and explain the analysis of political recruitment as well as the constraints on the political recruitment of female cadres for the 2017-2018 national mandate party in Pekanbaru City. The research data were obtained from several observations and direct interviews with parties related to the organization of the National Mandate Party wing. The results showed that the National Mandate Women (PUAN) conducted political recruitment of their candidates, namely they must have Partisans (high loyalty to parties). Obstacles or hindering factors for recruitment itself are due to national political conditions, public distrust of the promises of public officials which are an obstacle in recruiting female cadres, the lack of a generation of women to offer to join PUAN.

Keywords – *Recruitment, Female Cadre, PAN*

Abstrak – Peran generasi muda dan emak-emak yang semakin strategis dalam dunia politik menyebabkan Partai Amanat Nasional menyusun strategi rekrutmen perempuan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan analisis rekrutmen politik serta kendala rekrutmen politik kader perempuan partai amanat nasional 2017-2018 di Kota Pekanbaru. Data penelitian diperoleh dari beberapa observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi sayap Partai Amanat Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perempuan Amanat Nasional (PUAN) melakukan rekrutmen politik calonnya yaitu harus memiliki Partisan (kesetiaan yang tinggi terhadap partai). Hambatan atau faktor penghambat rekrutmen itu sendiri karena kondisi politik nasional, ketidakpercayaan masyarakat terhadap janji-janji pejabat publik yang menjadi kendala dalam perekrutan kader perempuan, kurangnya generasi perempuan untuk ditawarkan bergabung dengan PUAN.

Kata Kunci – *Rekrutmen, Kader Perempuan, PAN*

I. PENDAHULUAN

Menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara [5]. Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen terutama dalam pelaksanaan sistem dari prosedur rekrutmen yang dilakukan partai politik tersebut. Suharno menyatakan rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik [19].

Menurut Miriam Budiardjo, dalam negara demokratis Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain (1) sebagai sarana komunikasi politik, (2) sebagai sarana sosialisasi politik, (3) sebagai sarana rekrutmen politik, (4) sebagai sarana pengatur konflik. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik diebut sebagai perantara ide-ide (clearing house of ideas) [5]

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam suatu sistem politik Negara karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik

Dalam demokrasi kontemporer, partai politik juga digunakan untuk memberi pengaruh yang kuat atas kebijakan-kebijakan publik [1]-[10]. Keberadaan organisasi sayap diharapkan dapat berperan aktif dalam membina, mengembangkan dan memberdayakan komunitas masing-masing masyarakat sesuai dengan ranah, kebutuhan dan masalah yang dihadapinya. Seperti halnya organisasi harus mampu memetakan potensi, kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh komunitas pemuda serta merumuskan solusi dan langkah-langkah yang efektif, terutama yang berkaitan dengan upaya pemenangan pemilu, mengingat kelompok pemilih muda merupakan lumbung suara yang patut untuk diperhatikan oleh partai politik dalam memenangkan pemilu maupun pilkada setiap daerah.

PAN (Partai Amanat Nasional) merupakan partai politik yang secara kelahirannya adalah berasal dari organisasi maa islam yaitu Muhammadiyah. Yang menjadi aktor pendirinya adalah Amien Rais yang pada saat itu menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Partai PAN adalah ‘anak tunggal’ Muhammadiyah yang mencoba secara modern mereformasi Indonesia sesuai dengan sikap dan tradisi keterbukaan yang dulu pernah disemai oleh Amien Rais. PAN merupakan partai islam yang dilihat kelahirannya, sedangkan azas dari partai ini adalah pancasila dan bersifat terbuka jika dilihat dari AD PAN yaitu pasal 4 dan 5 [10]-[15].

Kebijakan yang membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam arus politik pemerintahan mulai terbuka lebar. Hal ini berfungsi untuk reformasi dalam regenerasi kepemimpinan politik di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah proses rekrutmen Perempuan Amanat Nasional Kota Pekanbaru [15]-[30].

Sehingga jumlah anggota pada organisasi tersebut tidak berkurang setiap tahunnya, seperti pada tabel berikut :

TABEL I
Jumlah Anggota Perempuan Amanat Nasional Kota Pekanbaru 2017-2018

No.	Tahun	Jumlah Anggota	% Penurunan	No.
1.	2016	32		1.
2	2017	24	25%	2
3	2018	20	21%	3

Sumber: Data Rekrutmen PUAN Pekanbaru, 2019

Dalam proses rekrutmen politik kader PUAN didasarkan pada latarbelakang pendidikan, bersedia mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan dan ketentuan serta peraturan partai dan bersedia menyatakan

diri menjadi anggota dengan membawa KTP berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah menikah dengan usia tidak lebih dari 40 tahun dan mengisi formulir lalu diserahkan ke dewan pimpinan daerah (DPD), setelah diproses kemudian diberikan kartu tanda anggota. Semua prosesnya dilakukan dengan gratis dan hal terpenting bagi Partai Amanat Nasional yakni setiap calon kader PUAN harus komitmen kepada perjuangan partai yang tidak memberi ruang bagi oknum kader partai yang memiliki perilaku menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan misalnya melakukan money politik.

Oleh karena itu, pendaftaran bakal calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional tidak hanya dikhususkan bagi kader Partai Amanat Nasional saja. Akan tetapi proses pendaftaran tersebut juga harus lolos verifikasi internal dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai Amanat Nasional. Proses rekrutmen partai politik di Partai Amanat Nasional, menurut AD/ART PAN Bab V Keanggotaan, Kader, dan Simpatisan pasal 8 ayat 1 (huruf a dan b), yang dimaksud anggota PAN adalah “warga negara Indonesia yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang dan yang memiliki kartu anggota PAN. Sedangkan simpatisan, menurut pasal 8 ayat 3, adalah “mereka yang mendukung tujuan dan perjuangan partai, tetapi belum terdaftar sebagai anggota partai”.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

Penelitian lain juga dilakukan oleh Fanina Fanindita pada tahun 2009 dengan judul penelitian Rekrutmen Politik Terhadap Perempuan Dalam Partai Politik Dan Parlemen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan rekrutmen perempuan di DPRD Sumatera Utara jika dilihat dari fungsi-fungsi yang dijalankan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota – anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.

Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik sebagai berikut (Lily Romli, 2005:93) :

- a. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa di rekrut untuk menduduki jabatan strategis.
- b. Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial seseorang, misalnya aktivis LSM.
- c. Immediate Survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- d. Civil Service Reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seseorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting dan tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rhanty Salsabila pada tahun 2016 dengan judul penelitian Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru Tahun 2014. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pola rekrutmen yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Pekanbaru Tahun 2014. Dalam pelaksanaan rekrutmen terbukanya pada pemilu tahun 2014 yang lalu, DPC Gerindra Kota Pekanbaru berhasil mengumpulkan 105 bacaleg dari tokoh masyarakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Galuh Ayu Ramadhani pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pola Rekrutmen Politik Kader Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama Pola Rekrutmen Politik Kader Perempuan Dalam Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung memiliki tahapan secara umum meliputi : Pola rekrutmen sistem konvensional dan Pola rekrutmen sistem pemilihan kader, sedangkan secara khusus yaitu dengan adanya pengrekrutan yang dilakukan oleh bidang ketahanan, dan keluarga.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti subjek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya. Adapun pendapat lain mengatakan penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.

Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru, serta dapat membantu peneliti memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif, (Namawi, 2009:12). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui rekrutmen politik kader perempuan Partai Amanat Nasional (PAN).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun beberapa sistem rekrutmen politik yang dilakukan terhadap calonnya yakni : Seleksi, Latihan(training), Penyortiran, Rotasi, Perebutan Kekuasaan, Patronasi Politik, Koopsi.

1. Seleksi

Untuk mengetahui sejauh mana yang dilakukan oleh PUAN dalam menyeleksi kader, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Hafid Muhaimin. H, ST selaku Kepala Sekretaris DPD PAN Kota Pekanbaru mengatakan bahwa: “ Kalau dari PAN sendiri sistem pengrekrutan calon anggota itu harus mengisi namanya dokumen partai integritas yang dimana calon anggota itu bisa dilihat ketersediaan dia menjadi anggota, kita tidak paksa dan kita tidak mengajak hanya kesedia dari dia sendiri. Untuk usia minimal 17 Tahun dan pendidikan juga tidak dibatasi minimal tamatan apa yang terpenting adalah niat awal dia masuk partai itu tujuannya membangun visi dan misi partai dan membangun solidaritas sesama anggota “ . (Wawancara, 26 Agustus 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa setiap kader PAN yang mau bergabung harus siap mengikuti setiap mekanisme baik itu mengisi formulir serta dokumen yang berkaitan pengrekrutan calon anggota partai dan hal ini tidak ada paksaan dan sifatnya kemauan diri sendiri serta hal ini bertujuan untuk membangun visi misi partai dan membangun solidaritas sesama anggota. Serta hal ini senada di unggkapkan oleh Ketua PUAN DPD PAN Kota Pekanbaru.. Di kesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nilawati, S.Pd selaku Ketua PUAN DPD PAN Kota Pekanbaru mengatakan bahwa:

“ Sistem pengrekrutan calon anggota PUAN di DPD Kota Pekanbaru, dilihat dari segi usia, minimal harus 17 tahun atau yang sudah mempunyai KTP dan jika dari segi pendidikan minimal dari tamatan SMA. Bahkan yang tamatan SMP bersedia ikut mendaftarkan diri sebagai calon anggota, intinya jika ingin bergabung mereka harus benar benar mempunyai solidaritas kepada partai. Yang penting kita mengrekrut orang-orang yang mempunyai loyalitas tinggi dan solidaritas dalam partai “ . (Wawancara, 1 September 2020).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa sistem pengrekrutan di PUAN lebih menekankan kader-kader yang siap berkontribusi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap PUAN. Hal ini berkaca dari meningkatnya partisipasi minat bagi kalangan tamatan SMA tak tertinggal juga bagi tamatan SMP, yang jelas sudah memiliki KTP. Dilihat disayat Partai Amat Nasional yang lain, salah satunya yakni BMPAN, peneliti juga melakukan wawancara berkaitan rekrutmen politik dengan Teguh Alfadeo selaku anggota BMPAN DPD PAN Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Kalau di BMPAN sendiri, kami mengrekrut atau menyeleksi dari faktor usia minimal 17 tahun atau yang sudah memiliki KTP, dan dari segi pendidikan itu sebenarnya tidak mempengaruhi mau dia tamatan apa sebenarnya dia tetap bisa masuk dalam ajang pengrekrutan di BMPAN. Yang terpenting adalah tujuan dia masuk itu karna apa, ada berkeinginan apa dia masuk partai dan tidak hanya sekedar cari nama ataupun uang”. (Wawancara, 10 Agustus 2020).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa sistem pengerutan di BMPAN juga sama bahkan senada dengan sayap partai lainnya, lebih menekankan yang ber royaltas tinggi bukan hanya mencari kepentingan sendiri untuk keikutsertaan harus memiliki KTP dan tidak memandang tingkat pendidikan. Dan dikesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Ratna Dewi selaku Ketua PUAN Cab. Marpoyan Damai mengatakan bahwa :

“Kalau di PUAN sendiri itu tidak dilihat dari segi usia, di PUAN sendiri bebas tidak dibatasi mau usia berapa tetapi harus sudah memiliki KTP. Pokoknya semua perempuan yang mau gabung ayo gabung tetapi yang berintegritas jangan sembarangan bikin malu partai. Kita harus menjaga nama baik partai dan di PUAN sendiri itu yang di wanti-wanti adalah ya itu tadi harus bisa memilah orang yang benar-benar dan serius untuk masuk dalam partai”. Memilih atau sistem nya itu sebenarnya yang siap berkomitmen, menjaga nama baik partai, siap mengembangkan partai. Semakin banyak kader yang kita rekrut ya semakin bagus partainya juga”. (Wawancara, 20 September 2020)

Wawancara diatas menjelaskan calon anggota PUAN di cabang Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tidak dilihat dari segi usia tetapi harus sudah memiliki KTP baik muda maupun yang tua, Dan di PUAN sendiri sistem pengrekrutannya dilihat apakah dia benar-benar berintegritas tinggi atau berkomitmen tidak di dalam partai.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa sistem pengerutan atau seleksi untuk calon anggota PUAN DPD PAN Kota Pekanbaru itu harus mengisi formulir pendaftaran, dan sudah memiliki KTP serta memiliki loyalitas yang tinggi dan solidaritas dalam partai untuk mengedepankan visi dan misi partai.

2. Latihan (Training)

Berdasarkan hasil wawancacara dengan Bapak Hafid Muahimin. H, ST selaku kepala sekretrasi DPD PAN Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa :

“Biasanya kalau training itu degantikan dengan pelantikkan, atau lebih dikenal dengan LKAD (Latihan Kader Amanat Dasar) disini calon memang diajarkan berorganisasi seperti apa dan diperkenalkan apa itu Partai Amanata Nasional. Ada juga yang sudah bergabung lama tapi tidak pernah mengikuti LKAD, tapi ada yang bergabung langsung ikut LKAD atau belum bergabung sudah pernah mengikuti LKAD baru ia bergabung dipartai, contohnya seperti kemeren di PAN dia ketika mau maju sebagai calon anggota dewan syaratnya adalah harus LKAD, ya dia harus melakukan LKAD terlebih dulu, walaupun dia tidak mejadi pengurus tetapi dia tetap mengisi formulir pendaftaran sebagai anggota. Untuk menjadi seorang anggota itukan mudah, hanya mengisi formulir sebagai anggota kita sudah buat kan KTA nya tetapi belum dinyatakan kader baru simpatisan (Orang yang tertarik atau otang yang mengikuti acara partai tapai belum menjadi kader) ketika dia mengikuti LKAD baru dinamakan kader. (Wawancara, 26 Agustus 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa latihan (Training) juga dilakukan oleh PAN, dengan ini dinamakan LKAD (Latihan Kader Amanat Dasar) yang bertujuan untuk melakukan pelatihan pelatihan berkenaan tentang seluruh yang berkaitan dengan partai. Dikatakan kader apabila sudah mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh partai amanat nasional minimal LKAD, jika tidak hanya menjadi simpatisan saja. Hal ini juga di ungkapkan dengan Ibu Yurmaheni, selaku Ketua Bidang Keorganisasian PUAN, menjelaskan bahwa :

“Ada, itulah namanya LKAD (Latihan Kader Amanat Dasar) ada tingkatan daerah, provinsi, dan pusat. LKAD sendiri dilakukan kurang lebih seminggu. Disitu diberikan pengembangan bagaimana berorganisasi, berpolitik, edukasi mengenai sayap partai dan lain sebagainya”. (Wawancara, 22 September 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa latihan (training) itu juga di lakukan oleh semua anggota di PUAN namanya LKAD. Dan untuk kegiatan latihan (training) ini dilakukan kurang lebih seminggu diadakannya. Disini bertujuan atau diberikan edukasi tentang berpolitik.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa, semua anggota di Partai Amanat Nasional harus melakukan namanya LKAD (Latihan Kader Amanat Dasar) baik itu di daerah, provinsi bahkan pusat.

Yang dimana LKAD sendiri dilakukan untuk memberikan edukasi cara bagaimana berorganisasi, berpolitik dan mengenai tentang partai dan sayap partai.

3. Penyortiran

Penyortiran atau penyeleksian ulang kembali dari jumlah awal untuk kembali mencari calon kader yang sesuai dengan syarat masuk rekrutmen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sherly Permata selaku Wakil Kepala Sekretaris DPD PAN Kota Pekanbaru:

“Kalau untuk penyortiran kembali itu tidak ada, itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan saja, dalam arti di dalam struktur kita kan sudah ada bidang-bidang, nah dari bidang-bidang itu kita menyesuaikan beberapa kebutuhan yang diinginkan partai. Sekarang itu kan harus 30% perempuan, jadi bagaimana pun perempuan harus didominasi dalam arti ketika ada perempuan yang ingin bergabung lebih besar dari pada laki-laki kita harus prioritaskan perempuan karena harus mencapai 30% itu tadi”. (Wawancara, 27 Agustus 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa, tidak adanya penyortiran yang dilakukannya oleh Kader Perempuan dan berdasarkan keikutsertaan perempuan dalam kepengurusan partai minimal 30% keterwakilan perempuan artinya sangat diuntungkan bagi Kader PUAN untuk bergabung dalam kepengurusan partai. Dikesempatan lain peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nilawati, S.Pd selaku Ketua PUAN DPD Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa :

“Misalnya sudah kita rekrut ada juga penilaiannya, cuma penilaian itu kita jadikan dalam bentuk kepengurusan saja, yang terpenting dia mau dan ikut bergabung dalam partai. Cuman penyortiran itu bukan disortir tatapi dilihat dari kemampuannya, kesolidtannya, dan dilihat dari jumlah absensi” (Wawancara, 1 September 2020).

Wawancara diatas menjelaskan bahwa setelah PUAN melakukan rekrutmen selanjutnya kader dinilai dan ditempatkan sesuai porsinya dalam kepengurusan. Hal ini menggambarkan bekerjanya bagian pengkaderan untuk menempatkan posisi bagi calon Kader.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa penotiran yang dilakukan oleh PAN itu dengan cara menempatkan para Kader sesuai dengan kapasitas serta porsinya masing masing.

4. Rotasi

Rotasi memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok kelompok yang berkuasa maka perlu adanya pergantian secara periode dalam jabatan jabatan politik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nilawati, S.Pd selaku Ketua PUAN Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa :

“ Kalau untuk di PUAN sendiri pergantian secara priodenya sekali lima tahun, jika memang tidak ada kandidat pengganti maka ia secara aklamasi diangkat “. (Wawancara, 1 September 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa rotasi yang terjadi atau pergantian pengurusan PUAN Kota Pekanbaru secara periode itu terjadi lima tahun sekali dan jika memang tidak ada kandidat pengganti, maka secara aklamasi diangkat.

5. Perebutan Kekuasaan

Tindakan-tindakan dengan menggunakan atau mengancam dengan kekerasan, untuk mendapatkan kedudukan di struktur partai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Badariah, S.Ag selaku Ketua Bidang Keorganisasian PUAN DPD PAN Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk perebutan kekuasaan di PUAN maupun di PAN itu sendiri tidak pernah terjadi sama sekali begitu pun yang terjadi di sayap partai apalagi itu PUAN. Kalau untuk perebutan kekuasaan dengan cara tindakan yang mengancam seperti itu tidak baik di contoh apalagi bermain dengan partai politik, itu sama sekali akan menjelekkkan nama baik partai itu sendiri”. (Wawancara, 18 September 2020)

Wawancara di atas menjelaskan bahwa perebutan kekuasaan di DPD PAN Kota Pekanbaru itu tidak pernah ada terjadi apalagi sampai membawa cara tindakan yang sistemnya mengancam. Hal ini dapat mencemarkan nama baik dari partai tersebut.

6. Patronasi Politik

Patronasi politik artinya suatu jabatan yang dapat di beli dengan mudah melalui relasi-relasi terdekat. Patronasi politik masih memiliki keterkaitannya dengan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Renny Yulia selaku Sekretaris PUAN DPD PAN Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa :

“Tidak ada, berdasarkan diadakannya rapat pembentukan PUAN nanti kita mau mencari pengurus itu diadakan nya musyawarah bukan sistem pembelian jabatan oleh relasi-relasi terdekat”. (Wawancara, 21 September 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa yang terjadi di PUAN mulai dari pembentukan sayap partai ini selalu mengedepankan musyawarah internal kepengurusan. Hal ini dapat dikatakan tidak adanya patronasi politik. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hafid Muhaimin. H, ST selaku Kepala Sekretaris DPD PAN Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa :

“Tidak ada, karena semua nya itu real bagi yang aktif, bagi yang berpotensi, bagi yang mempunyai masa, kemampuan, komunikasi dan menerima aspirasi masyarakat. Karena 200% meningkat kemarin dari perolehan suara maupun kursi, itu membuktikan bahwa Partai Amanat Nasional tidak ada namanya jabatan yang dapat dibeli dari relasi-relasi terdekat”. (Wawancara, 26 Agustus 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa DPD PAN lebih menekankan kader-kader yang memang berpotensi baik itu dari pengalaman masa, berkemampuan berkomunikasi, serta cara menerima daripada aspirasi masyarakat ini yang akan berpotensi untuk mengisi jabatan-jabatan penting di DPD PAN Kota Pekanbaru serta untuk patronasi politik yang terjadi di DPD PAN boleh dikatakan tidak ada. Peneliti juga melakukan wawancara bersama Ibu Ratna Dewi, selaku Ketua PUAN Cab. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa :

“Tidak ada, kalau di saya karena saya yang megang Kecamatan Marpoyan Damai saya punya prinsip sistem rekrutmen yang saya buat saya akan merekrut atau memberi jabatan kepada siapapun yang berkomitmen, berkompiten dan berintegritas dan saya tidak akan memandang bulu dari segi apapun. Kalau dia bagus ya saya akan letak atau ditempatkan yang bagus pula nantinya. Tidak harus melalui relasi untuk membeli jabatan”. (Wawancara, 20 September 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa PUAN Cab. Marpoyan Damai lebih merekrut orang-orang yang mmepunyai komitmen.dan berintegritas tinggi agar nantinya akan di berikan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya tidak melalui relasi terdekat untuk menduduki suatu jabatan.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa yang terjadi di partai maupun sayap partai itu tidak ada terjadinya Patronasi Politik mau di internal partai maupun eksternal nya. Karena hal ini dapat menyebabkan terjadi persimpangan sosial antara dua belah pihak. Dan yang terpenting yang akan di rekrut di partai maupun sayap partai adalah orang-orang yang memang berkomitmen, mempunyai semangat berorganisasi dan berintegritas tinggi, kelak akan menduduki jabatan yang sesuai dengan kinerjanya.

7. Koopsi

Koopsi adalah pemilihan anggota-anggota baru artinya masuknya orang-orang atau anggota baru untuk menciptakan pemikiran yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujuinya. Berdasarkan wawancara bersama Ibu Nilawati, S.Pd selaku Ketua PUAN DPD PAN Kota Pekanbaru, menjelaskan bahwa :

“Adanya koopsi di PUAN ini sebenarnya mempunyai motto kalau bisa kami membirukan Pekanbaru dengan tujuan memasukkan orang-orang untuk menciptakan pemikiran yang baru juga tentunya. PUAN ini tidak membatasi orang-orang yang ingin masuk ke PUAN tetapi balik lagi tujuannya yaitu untuk membawa visi dan misi yang sama dalam partai”. (Wawancara, 1 September 2020)

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa yang terjadi di sayap PUAN juga melakukan koopsi pada kader-kader. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemikiran yang baru dan PUAN juga sebenarnya tidak membatasi orang-orang yang berkeinginan masuk tetapi balik lagi tujuannya yaitu membawa visi dan misi yang sama dalam partai.

Hal ini senada juga dengan Bapak Hafid Muhaimin. H, ST selaku Kepala Sekretaris DPD PAN Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa :

“Ada, jadi memang rata-rata pengurus PUAN itu memang diluar kepengurusn partai tapi ada beberapa yang sudah bergabung di partai bergabung juga ia di PUAN, karena memang harus mencari lagi. Karena untuk di struktur PUAN itu juga sudah sampai ke tingkat DPC ketingkat Kecamatan. Dari daerah ke kecamatan jadi dia itu hampir sama seperti partai. Banyaknya pun sudah sama seperti partai ada DPC , dan ada juga DPD”. (Wawancara, 26 Agustus 2020)

Wawancara diatas menjelaskan bahwa kepengurusan PUAN Kota Pekanbaru juga melakukan koopsi baik kader PUAN itu sendiri yang dilakukan PUAN Kota Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan adanya kader DPD PAN yang bergabung untuk menduduki porsi kepengurusan atau struktur kepengurusan PUAN.

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa yang terjadi di partai ataupun sayap partai itu adanya koopsi atau memasukkan orang baru untuk bergabung ke dalam partai dengan tujuan untuk menciptakan pemikiran yang baru dan menciptakan visi dan misi yang sama dalam partai.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Kota Pekanbaru, maka penulis dapat mengambil beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Perempuan Amanat Nasional (PUAN) menggunakan teori rekruitmen politik yang dapat diuraikan beberapa indikator yaitu : Seleksi (pemilihan berdasarkan usia dan pendidikan), Latihan (Training), Penyortiran (Penyeleksian ulang kembali dari jumlah awal untuk mencari calon kader yang sesuai dengan syarat masuk rekruitmen), Rotasi (Tujuan mencegah terjadinya dominasi jabatan dari kelompok-kelompok yang berkuasa, maka perlu adanya pergantian secara periode dalam jabatan-jabatan politik), Perebutan Kekuasaan (Tindakan-tindakan dengan menggunakan atau mengancam dengan kekerasan, untuk mendapatkan kedudukan di struktur partai), Patronasi Politik (Jabatan yang mudah dibeli dengan melalui relasi – relasi terdekat), Koopsi (Pemilihan anggota baru atau memasukkan orang-orang baru untuk menciptakan pemikiran yang baru sehingga membawa suatu partai pada visi dan misi yang ditujunya).
2. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekruitmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah mereka yang memiliki suatu kemampuan dalam kepemimpinan pada organisasi sayap partai PUAN, pada setiap rekruitmen bukan berarti sebuah organisasi tidak mengalami kendala yang akan muncul. Adapun kendala dalam rekruitmen tersebut adalah: 1. kebiasaan-kebiasaan organisasi (kebiasaan ini merujuk pada kebiasaan kepemimpinan, kepemimpinan yang baik maka akan menghasilkan organisasi yang berjalan sesuai dengan tujuan). 2, sumber daya manusia (didalam organisasi PUAN pengkaderan adalah upaya partai dalam mencari bibit generasi muda maupun tua yang mempunyai jiwa pemimpin). 3, kondisi internal organisasi (perbedaan pendapat sering sekali menjadi kendala dalam rekruitmen, bahkan dari perdebatan pendapat itu pula yang dapat menyebabkan anggota yang sudah lama bergabung nantinya akan keluar dari organisasi, bukan malah menambah anggota tapi secara pelan mengurangi rekruitmen dengan sendirinya)., 4, kondisi perpolitikan (kondisi ini menjadi kendala dalam rekruitmen dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat publik yang ingkar dan imbasnya ke organisasi sayap partai). 5, pemasaran dalam budaya organisasi (upaya organisasi dala memperkenalkannya ke masyarakat luas, upaya tersebut diimbangi dengan gaya yang menarik sehingga memunculkan ketertarikan masyarakat untuk bergabung terutama generasi perempuan).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kantor Wilayah DPD Pan Kota Pekanbaru dan Universitas Abdurrab yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta berbagai informasi terkait upaya penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

- [1] Anggraini, Cholida Eka, and Joko Sutarto. "Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan dalam Partai Politik Studi Kasus PDIP dan PKS Kota Surakarta." *Komuniti: Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi* 6.2 (2017): 132-141.
- [2] Anindyka Dwi Aziza. (2016). Rekrutmen dan Pembekalan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Samarinda Tahun 2015 Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda. *E-journal Ilmu Pemerintahan*. Volume 4, No. 4. Diakses dari [https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/10/Anindyka%20Dwi%20Aziza%20\(1-21-16-10-18-11\).pdf](https://ejournal.ip.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2016/10/Anindyka%20Dwi%20Aziza%20(1-21-16-10-18-11).pdf), diakses 23 Februari 2020.
- [3] Anugrah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam
- [4] Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta (2008): 128-215.
- [5] Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [6] Budiardjo, Miriam, N. Soeseno, and R. Evaquarta. "Pengantar Ilmu Politik." Jakarta: Gramedia (2000).
- [6] Cipto, Bambang. (1996). *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Pustaka Pelajar.
- [7] Cholisin, Nasawan. (2012). *Dasar-Dasar ilmu politik*. Yogyakarta: Omba.
- [8] Daulay, Harmona. (2007). *Perempuan dalam kemelut gender*. USU Press.
- [9] Dra. Mazdalifah MSi. (2011). *Perempuan Dan Organisasi*. Diakses dari <http://mazdalifahjalil.wordpress.com/2011/12/04/perempuandan-organisasi/>
- [10] Dyah Witasoka. (2013). *Arti Kader Dan Pengkaderan*. Diakses dari <http://langittakwa.blogspot.com/2013/01/arti-kader-danpengkaderan.html>
- [11] Fakhri, Mansour. (2007). *Analisis gender & transformasi social*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [12] Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik. Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [13] H. Agus Salim Sitompul. (2005). *44 Indikator Kemunduran HMI: Suatu Kritik dan Koreksi untuk Kebangkitan Kembali HMI*. Jakarta: Misaka Galiza. hlm. 10.
- [14] Habibah, St. "Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik." *Al-Maiyyah* 8.2 (2015): 342-366.
- [15] Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- [16] Handoko, T. Hani. "Manajemen sumber daya manusia." Yogyakarta: BPFE (2001).
- [17] Hasim, Erly. "Peran komunikasi partai politik dalam proses rekrutmen kader perempuan pada partai politik di Aceh." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8.3 (2018): 297-306.
- [18] Prihatmoko, Joko J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, sistem, dan problema penerapan di Indonesia*. Kerja sama Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M), Universitas Wahid Hasyim, Semarang.
- [19] Kencana, Inu. "Syafie." *Pengantar Ilmu Politik*.
- [20] Mansour Faqih, 2003. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- [21] Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. cetakan 27. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. \
- [22] Mulia, S. Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan & Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [23] Umar, Nasaruddin. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- [24] UB, Ahmad Riyadh, and Hendra Sukmana. *Model Rekrutmen Politik Calon Anggota Legislatif oleh Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo*. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 3.2 (2015): 179-198.
- [25] Naqiah, Najilah. (2005). *Otonomi Perempuan*. Malang : Bayumedia Publishing.
- [26] Pudji Astuti, Tri Marhaeni. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: UnnesPress.
- [27] Ramadhani, Galuh Ayu. (2019) *Pola rekrutmen politik kader perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tulungagung*. Diss. Universitas Negeri Malang.
- [28] Rakyat, Dian. 2005. *PEMBANGUNAN BERSPEKTIF GENDER melalui perspektif gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat
- [29] Ritonga, Suryajadi. (2016). *Implementasi Kuota 30% Perempuan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dari Partai Golkar Hasil Pemilu 2014*. Pekanbaru: Universitas Abdurrab.
- [30] Sembiring, Oktanina Br. "IMPLEMENTASI REKRUTMEN POLITIK PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA." (2019).
- [31] Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.
- [32] Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- [33] Sugihastuti, Itsna Hadi Saptiawan. (2007). *Gender & Inferioritas Perempuan*, Pustaka Pelajar.
- [34] Sugiarti, dkk. 2003. *Pembangunan dalam Perspektif GENDER*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- [35] Tiyas, Tinov MY, and Allan Yanika. *Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Provinsi Riau Periode 2014-2019*. Diss. Riau University.